



► KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pengelolaan Sampah Ilegal Menjamur

PANDAK—Aktivitas pengelolaan sampah ilegal kembali ditemukan di wilayah Bantul, tepatnya di Dusun Kwalangan RT 1, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak. Bisnis ilegal ini dikeluhkan warga lantaran menimbulkan polusi.

Bisnis ilegal ini dikeluhkan warga karena memang menimbulkan bau menyengat. Selain itu, asap pembakaran sampah yang dilakukan dianggap menciptakan polusi udara dan mengganggu aktivitas harian masyarakat.

Dari pantauan *Harian Jogja* langsung di lokasi, Sabtu (24/5), terlihat sampah-sampah dikumpulkan di sebuah lahan berpagar besi, berdekatan dengan pemukiman warga. Terlihat cerobong tinggi dan tumpukan sampah yang belum dibakar. Tak jauh dari lokasi tersebut, ditemukan pula pekarangan penuh tumpukan sampah hingga meluber ke pinggir jalan.

Ketua RT setempat, Waluyo mengungkapkan bahwa aktivitas

ini sudah berlangsung lama. Sampah dibakar oleh pemilik usaha yang berasal dari luar daerah. "Dulu dia satpam perumahan di Sleman. Setelah diberi tanggung jawab urus sampah di situ, dia keluar kerja dan malah buka usaha sendiri di sini. Sekarang malah jadi tempat buang sampah dari luar," ujar Waluyo, Sabtu (24/5).

Awalnya, sampah yang diambil masih memiliki nilai ekonomi, seperti kardus dan botol plastik.

Namun, sejak TPST Piyungan ditutup, jenis sampah yang dibawa makin beragam dan menimbulkan bau menyengat. Selain dibakar, ada juga yang dibuang ke selokan agar hanyut ke sungai saat hujan.

Melihat potensi keuntungan, beberapa warga sekitar ikut-ikutan menjalankan bisnis serupa. Tetapi dampaknya makin parah. "Kalau siang itu kayak kabut asap sampah. Malam hari, asapnya masuk rumah. Anak saya sendiri yang punya riwayat asma jadi sering kambuh," keluh

Waluyo.

Meskipun pembakaran kini tak sesering dulu, tumpukan sampah masih dibiarkan di lokasi. Warga mengaku sudah melapor ke pemerintah kalurahan, tetapi belum ada tindakan berarti. Bahkan segel dari Satpol PP pun bisa dibuka dengan mudah.

Kepala Satpol PP Bantul, Raden Jati Bayubroto membenarkan bahwa pihaknya telah menutup lokasi pengolahan sampah ilegal di sejumlah titik. "Pekan ini kami bersama DLH menutup tiga lokasi di Kwalangan, serta di wilayah Bantul, Jetis, Banguntapan, dan Pajangan. Total tujuh lokasi selama bulan ini," ujarnya.

Namun, pemilik usaha kerap mangkir dari panggilan Satpol PP. Dari hasil penelusuran, diketahui sampah berasal dari luar Bantul dan pelanggan dikenakan tarif Rp500.000 hingga Rp1 juta per sekali buang. Praktik ini diduga sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir. (Yosef Leon)